



Tahta Adilla/Republika

## Bravo 'Partai Golput'

■ Oleh Harun Husein

Jumlah yang tidak memilih dalam pemilu kali ini mencapai 46 juta.

**K**emampuan partai politik di Indonesia dalam menangkan suara pemilih, kian memble. Kinerja partai-partai pada dua pemilu terakhir terslip oleh 'Partai Golput'. Di saat yang sama, efektivitas partai yang masuk parlemen, ternyata juga tak menggembirakan.

Pada Pemilu 2014 ini, 'Partai Golput' meraih suara sebanyak 46 juta. Angka ini dua kali lipat dibanding suara pemenang pemilu resmi yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum, yaitu PDI Perjuangan. Partai Banteng itu hanya mampu meraih 23 juta suara.

Golongan putih alias orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, telah menjadi pemenang sejak Pemilu 2009 lalu. Saat itu, 'Partai Golput' meraih hampir 50 juta suara. Padahal, pemenang pemilu resmi saat itu, Partai Demokrat, hanya meraih 21 juta suara.

Besarnya angka golput ini, memang sedikit tertutupi oleh angka partisipasi pemilih yang meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Berdasarkan perhitungan KPU, partisipasi pemilih saat ini adalah 75,11 persen, sedangkan partisipasi pemilu sebelumnya 70,99 persen.

Betapun, angka golput yang mencapai 24,89 persen terhadap pemilih terdaftar—yang menurut data terakhir versi KPU adalah 185,8 juta—dapat dikatakan moderat, tapi angka absolutnya yang begitu besar, tetap saja mengganggu. Sebab, angka golput pada pemilu kali ini, lebih besar dibanding penduduk di Jawa Barat, provinsi yang jumlah penduduknya paling banyak di Indonesia. Menurut sensus BPS 2010, penduduk Jawa Barat berjumlah 43 juta orang.

Atau, kalau angka golput itu kita bandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Gorontalo yang hanya satu juta orang, perbandingannya lebih dramatis lagi. Sebab, angka golput itu adalah 46 kali lipat penduduk Gorontalo. Ini tentu angka yang sangat massif.

Tanpa mengecilkkan keberhasilan KPU yang mampu menekan angka golput hingga empat poin persen dibanding pemilu sebelumnya, menjadi pertanyaan menarik mengapa golput ini masih sedemikian besar. Dari penelusuran *Republika*, ada sejumlah faktor yang dapat diduga sebagai penyebab tingginya angka golput ini. Pertama, kemampuan mesin politik partai yang kian kedodoran.

Fakta itu terlihat dari raihannya suara pemenang pemilu yang menurun secara konstan. Pada Pemilu 1999 lalu, PDI Perjuangan yang menjadi pemenang pemilu, berhasil meraup 33,74 persen suara. Pada Pemilu 2004, Partai Golkar yang jadi pemenang, meraih 21,58 persen suara. Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat yang menjadi pemenang, meraup 20,81 persen suara. Sedangkan, pada Pemilu 2014 ini, PDIP yang menjadi pemenang, hanya meraih 18,95 persen suara.

Pemilu kali ini pun kian mengukuh-

kan bahwa di Indonesia tidak ada partai besar. Sebab, suara yang hanya 18,95 persen itu, sejatinya masih masuk kategori partai kelas menengah alias medioker.

### Fragmentasi

Lebih parah lagi, kondisi itu kian memperparah fragmentasi kepartaian di parlemen. Sebab, jumlah partai efektif di parlemen—yang biasa diukur dengan indeks ENPP (*the Effective Number of Parliament Parties*), justru sangat tinggi.

Menurut perhitungan ahli matematika pemilu, Pipit R Kartawidjaja, indeks ENPP parlemen hasil Pemilu 2014 adalah 8,16. Angka ini lebih tinggi dibanding indeks ENPP hasil Pemilu 2009 yaitu 6,21. "Artinya, sistem kepartaian kita adalah sistem kepartaian ultra atau ekstrem. Ini berarti misi UU No 8/2012 tentang Pemilu gagal, dan bakal menyusahkan sistem presidensial," kata Pipit kepada *Republika*, pekan lalu.

Pipit membandingkan kasus Indonesia dengan Inggris. Parlemen Inggris saat ini diduduki oleh 12 partai, lebih banyak ketimbang Indonesia yang hanya 10 partai. "Tapi, meski lebih banyak ketimbang di Indonesia, ENPP-nya hanya 2,6 alias tergolong dwi-kepartaian. Itu karena di parlemen Inggris ada dua partai yang dominan. Sedangkan partai dominan di Indonesia tidak ada. Menurut ukuran internasional, kalau suaranya di bawah

20 persen itu disebut partai menengah, sedangkan kalau di bawah 10 persen itu disebut partai gurem," kata Pipit.

Giovanni Sartori, seorang ilmuwan politik, mengklasifikasi sistem kepartaian sebagai dwipartai jika ENPP-nya 2-3. Jika jumlahnya 3-5, masuk kategori moderat sederhana. Adapun di atas lima masuk kategori ekstrem atau ultra. "Jadi, sistem kepartaian itu sederhana atau tidak, bukan dilihat dari jumlah parpo secara riil. Para ahli sepakat mengukur berdasarkan efektivitasnya," kata August Mellaz, kepada *Republika*, beberapa waktu lalu.

Penyebab kedua, yang berkaitan erat dan punya hubungan sebab akibat dengan penyebab pertama, adalah kian rendahnya identifikasi masyarakat terhadap partai politik (*party id*). Menurut penelitian sejumlah lembaga survei, *party id* pemilih di Indonesia meluncur jatuh dengan ekstrem. Pada tahun 1999 lalu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapati masyarakat yang mengidentifikasi dirinya dengan partai masih 86 persen. Pada 2004, turun menjadi 54 persen. Selanjutnya, pada 2009, tinggal 20 persen.

Tapi, penurunan itu masih berlanjut. Pengukuran Indikator Politik Indonesia (IPI) pada Maret 2013, angka *party id* tinggal 14,3 persen. Selanjutnya, pada Oktober 2013 tinggal 10 persen. Padahal, jika angka *party id* tinggal 10 persen, itu berarti angka pemilih mengambang

(*floating voters*) adalah 90 persen.

Alhasil, jika ke depan tak ada perubahan, maka pemilu-pemilu ke depan kita akan terus menyaksikan 'Partai Golput' mempecundangi partai-partai di Indonesia yang kian tak mengakar. Partai-partai yang kian jauh dari rakyat, dan menjadi alat pengeruk suara (*electoral machine*) belaka.

Penyebab ketiga, adalah kemampuan penyelenggara pemilu dalam sosialisasi dan mengajak pemilih memberikan suaranya di TPS. Benar bahwa memilih adalah hak, dan tidak mungkin dipaksa. Tapi, sampai saat ini KPU tidak kunjung bisa menjelaskan seberapa banyak dari angka 46 juta golput itu yang masuk kategori golput ideologis—yang memang tak bisa dipaksa—dan berapa yang masuk kategori golput teknis, seperti tidak ke TPS karena tidak mendapat surat undangan, kasus yang berkaitan erat dengan manajemen pemilu.

Telunjuk kepada KPU ini juga masih bisa diarahkan dalam kasus banyaknya suara tidak sah dalam pemilu kali ini. Apakah sosialisasi pencoblosan yang dilakukan KPU berhasil, kalau ada 14,6 juta orang yang melakukan kesalahan mencoblos saat pemilu, yang berakibat suaranya hangus? Memang, KPU dapat berkalah bahwa pada Pemilu 2009 lalu, angka suara tidak sah ini lebih besar. Tapi, pada Pemilu 2004, yang teknik pemberian suaranya sama, yaitu mencoblos partai dan calon, toh hanya 10,9 juta pemilih yang melakukan kesalahan.

Sudah tiga kali pemilu digelar di mana pemilih disuguhi surat suara besar berisi partai dan caleg, dengan teknik pencoblosan yang hampir sama. Sehingga seharusnya sudah ada pembiasaan. Tapi, ternyata banyak pemilih yang masih jatuh ke lubang yang sama. ■

### EMPAT PEMILU DAN PEMENANGNYA

PEMILU	PEMENANG	SUARA	%*	GOLPUT	%**
1999	PDIP	35.689.073	33,74	8.320.010	7,06
2004	Golkar	24.480.757	21,58	23.580.030	15,93
2009	Demokrat	21.655.295	20,81	49.677.076	29,01
2014	PDIP	23.681.471	18,95	46.252.097	24,89

#### Keterangan:

\*% adalah persentase suara partai pemenang pemilu terhadap seluruh suara sah.  
\*\*% adalah persentase yang tidak menggunakan hak memilih terhadap total pemilih terdaftar.

Sumber: KPU, diolah Harun Husein.

### PARTISIPASI PEMILIH, SUARA SAH, DAN TIDAK SAH

PEMILU	PEMILIH	YANG MENCOBLOS	SUARA SAH	%	SUARA TIDAK SAH	%
1999	117.815.053	109.495.047	105.786.661	96,60	3.708.386	3,4
2004	148.000.369	124.420.339	113.462.414	91,2	10.957.925	8,8
2009	171.265.442	121.588.366	104.048.118	85,6	17.540.248	14,4
2014	185.826.024	139.573.927	124.972.491	89,54	14.601.436	10,46

Sumber: KPU, diolah Harun Husein



# PEMILU 2014

## dengan Sejumlah Catatan

■ Oleh Harun Husein

Proporsionalitas pemilu membaik, tapi efektivitas parlemen kian memburuk.

Pemilu 2014 kali ini, bisa dikatakan sebagai pemilu yang cukup kontroversial. Ada sejumlah kemajuan di sana sini, tapi pada saat bersamaan, kekurangan-kekurangannya pun meningkat. Salah satu frase yang mengemuka dalam pemilu kali ini adalah "pemilu yang brutal".

Peningkatan yang paling menyolok dari pemilu kali ini adalah pada derajat proporsionalitasnya. Menurut perhitungan *Republika*, menggunakan formula Gallagher, Least Square (LSq) Index pemilu kali ini adalah 3,0. Makin rendah angkanya, makin tinggi derajat proporsionalitasnya.

Dilihat dari indeks LSq tersebut, pemilu kali ini bahkan lebih baik derajat proporsionalitas ketimbang Pemilu 1999 lalu. Indeks LSq Pemilu 1999 adalah 3,2. Sedangkan, indeks LSq dua pemilu lainnya lebih tinggi yaitu 4,16 pada Pemilu 2004, dan 6,0 pada Pemilu 2009. Secara sederhana, proporsionalitas ha-

sil sebuah pemilu, diukur dengan membandingkan jumlah suara dengan kursi. Jika terjadi kesenjangan yang besar, itu merupakan pertanda adanya disproportionalitas. Misalnya, bila persentase jumlah kursi yang diraih partai ternyata jauh lebih besar dibanding suaranya.

Cara lain untuk mengukur derajat proporsionalitas, adalah dengan banyaknya pemilih yang terwakili alias suaranya terkonversi menjadi kursi. Bila banyak suara terbuang, tidak sah, ditambah partisipasi pemilih yang rendah, tentu derajat keterwakilan juga menjadi terpuruk.

Naiknya angka ambang batas perwakilan (*parliamentary threshold*), semula sempat diperkirakan bakal menjadi penyebab bakal banyaknya suara hangus. Namun, tampaknya pemilu kali ini tertolong oleh sedikitnya jumlah peserta pemilu, dan lebih banyaknya partai yang masuk parlemen.

Pada Pemilu 2009, ada 38 partai yang menjadi kontestan. Tapi, hanya sembilan yang lolos ke parlemen. Total suara 29 partai yang tak lolos parlemen itu mencapai 19 juta.

Sedangkan, pada Pemilu kali ini, kontestannya hanya 12 partai, dan hanya dua yang tak lolos *parliamentary threshold*. Total suara hangus kedua partai ini kecil belaka, hanya 2,9 juta. Alhasil, persentase suara dengan kursi partai-partai yang masuk Senayan, kian mendekati.

Pada Pemilu 2009 lalu, misalnya, Partai Golkar meraih 14,45 persen suara, tapi kursinya 18,93 persen, alias memenangi surplus proporsionalitas 4,48 persen. Pada Pemilu 2014 ini, suaranya 14,75 persen, sedangkan kursinya 16,25 persen, alias hanya ketambahan 'bonus' 1,5 persen.

Suara terkonversi pada Pemilu 2014 ini juga lebih besar, karena meningkatnya partisipasi pemilu dan menurunnya angka golput, serta berkurangnya suara tidak sah. Meski, angka golput dan suara tidak sah itu tetap saja mencemaskan.

Alhasil, jika pada Pemilu 2009 lalu pemilu di Indonesia sudah masuk kategori semiproporsional bahkan terancam disproportional, pemilu kali ini berhasil membalikannya. Tapi, persoalannya, pengukuran dengan indeks LSq, hanyalah satu indikator keberhasilan.

Indikator lain yang juga perlu digunakan adalah efektivitas partai-partai yang masuk parlemen. Untuk soal ini, biasa diukur dengan indeks ENPP (*the effective number of parliament parties*), menggunakan dalil Laakso Taagepera.

Sialnya, indeks ENPP ini justru kian terdongkrak. Berdasarkan perhitungan pengamat pemilu dari Watch Indonesia di Jerman, Pipit R Kartawidjaja, indeks ENPP pemilu kali ini mencapai 8,16. Ini merupakan sinyal bahwa pemilu tidak berhasil melahirkan sistem kepartaian efektif di parlemen.

## Ada Ketidakcocokan Misi dan Hasil Pemilu

Hasil pemilu sudah diumumkan. Ada sepuluh partai yang masuk parlemen. Sudah efektifkah sistem kepartaian di parlemen? Apakah pemilu kali ini juga lebih baik dibanding sebelumnya? Berikut pendapat pengamat pemilu dari Watch Indonesia, Pipit Kartawidjaja:

**Jumlah suara yang diraih pemenang pemilu semakin menyusut, sementara parpol yang masuk parlemen lebih banyak dibanding sebelumnya. Karena pemilih yang kian tinggi volatilitasnya dan partai yang kian parah terfragmentasi?**

Volatilitas memang tinggi. Hanya harus dibedakan juga volatilitas antarkubu. Kalau saya berangkat dari pembagian almarhum Mas Mulyana W Kusumah, bahwa di Indonesia sistem kepartaian terbagi ke dalam kubu sekuler dan Islam. Maka, volatilitas yang tinggi itu berdasarkan penghitungan saya terjadi di dalam tubuh kubu sekuler sekitar 15 persen. Sedangkan, dalam tubuh Islam hanya sekitar empat persen. Ini hitungan yang bertolak dari partai yang masuk DPR saja.

Selain itu, volatilitas juga harus dipahami bahwa partai sekuler yang berkuasa, Demokrat, mendapatkan angka jeblok dari pemilih. Lalu, apa yang disebut kemenangan PDIP sebenarnya bukan kemenangan, tapi kembali ke posisi tahun 2004. Begitu juga PKB.

**Dari sisi jumlah partai yang masuk parlemen, bagaimana efektivitasnya bila diukur dengan indeks**

**ENPP?**

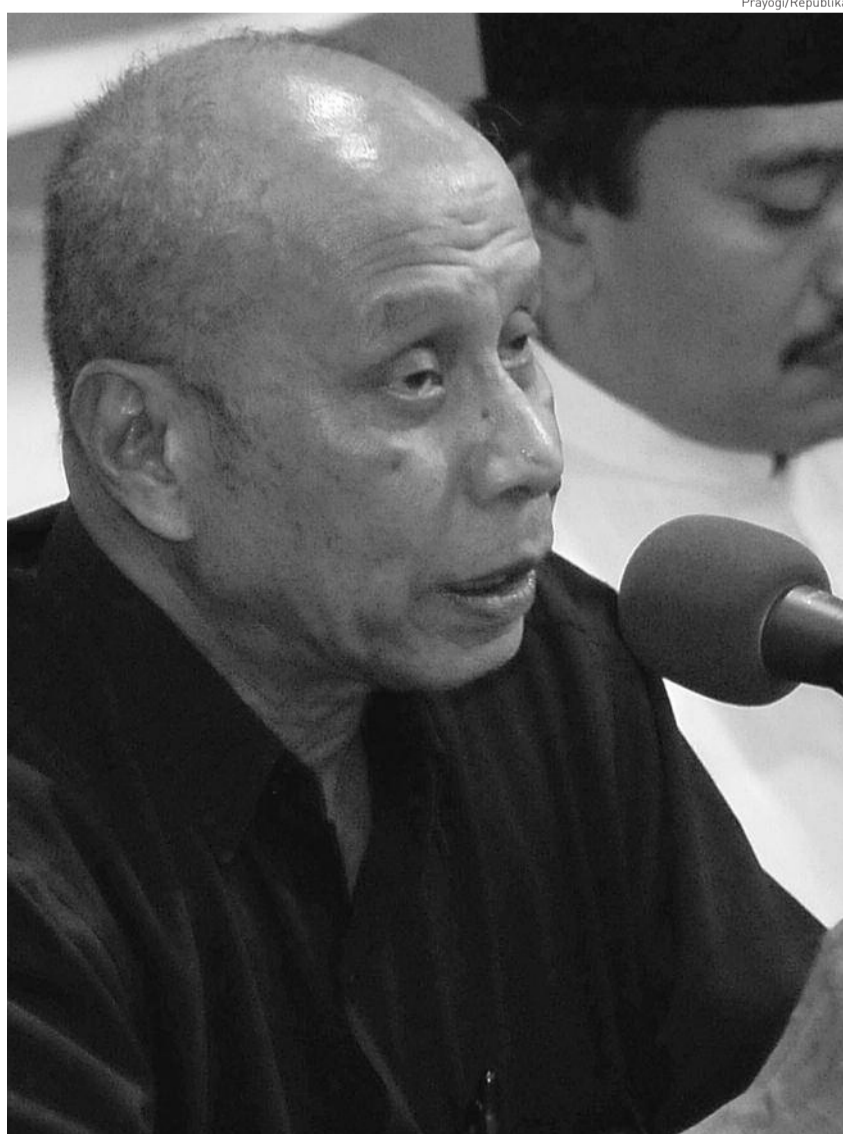
Sekarang, ENPP alias jumlah efektif partai di parlemen itu tinggi, yaitu 8,16. ENPP DPR 2009 'hanya' 6,21. Artinya, seperti DPR 2009, sistem kepartaian di parlemen kita adalah sistem kepartaian ultra atau ekstrem. Sebagai perbandingan, di DPR Inggris saat ini duduk 12 partai. Meski lebih banyak ketimbang di Indonesia, tapi ENPP-nya 2,6 alias tergolong dwikepartaian. Karena ada dua partai yang dominan di sana. Sedangkan partai dominan di Indonesia nggak ada. Berdasarkan standar internasional, di bawah 20 persen itu disebut partai menengah, di bawah 10 persen disebut parpol gurem.

Dengan demikian, misi UU Pemilu No 8/2012 gagal, dan bakal menyusahkan sistem presidensialisme yang maunya efektif. Solusinya, pederhaan harus dibuat dalam tubuh DPR dan mereformasi hubungan legislatif dan eksekutif

**Apa komentar Anda pada fenomena PKB dan Hanura yang kursinya tetap saja lebih kecil dibanding suaranya?**

Kalau dihitung secara proporsional, memang PKB dan Hanura merupakan parpol yang dirugikan kursinya. Sebab, PKB kurang empat kursi dan Hanura kekurangan 13 kursi.

Kalau Hanura kekurangan itu gejala normal. Sebab, sebagai partai terganggu dan juga terganggu di daerah pemilihannya dalam dapil antara 3-10, dia selalu dirugikan. Hanura hanya bisa selamat jika ada partai lebih gurem dari Hanura. Begitu nasib si bungsu, harus rela ngalah. Yang bisa menyelamatkan



Prayogi/Republika

